

KPU Perpanjang Pendaftaran Capres-Cawapres Jika Hanya Ada 1 Paslon

JAKARTA (IM) - KPU akan memperpanjang jadwal pendaftaran capres dan cawapres jika hanya ada satu pasangan calon (paslon) selama periode yang telah ditentukan.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 56 disebut perpanjangan dilakukan selama 7 hari.

"Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangan calon selama 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari," bunyi Pasal 56 ayat (1) Bab VII tentang Perpanjangan Pendaftaran, dikutip pada Minggu (15/10).

"KPU melakukan perpanjangan pendaftaran kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tujuh hari," demikian tercantum dalam ayat kedua.

Jika dalam periode pendaftaran sudah ada bakal paslon lain, maka hal ini tak berlaku. Jika perpanjangan pertama tak kunjung ada paslon baru, KPU memberikan waktu kembali selama 7 hari di kesempatan kedua.

"Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaf-

taran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan perpanjangan pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) Hari," bunyi Ayat ke-4 Pasal 56.

Setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran dan kondisinya masih sama. Maka, tahapan pemilu presiden dan wakil presiden mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam hal setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran masih terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini," tertulis di Pasal 56 Ayat (6).

Berdasarkan PKPU terbaru yang dilihat, peraturan ini memuat tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen hingga penetapan dan pengundian nomor pasangan calon (Paslon). Adapun disepakati, pendaftaran bakal pasangan calon pada 19-25 Oktober 2023. ● han

Sadikin Rusli Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Sadikin Rusli (SR) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

"Penyidik melakukan penangkapan terhadap saksi SR, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Minggu (15/10).

Sumedana menegaskan, Sadikin terbukti melawan hukum sebagai perantara saweran proyek BTS BAKTI Kominfo sebesar Rp 40 miliar. Hal tersebut sesuai dalam fakta persidangan yang sebelumnya disebut bahwa Sadikin diduga memberikan saweran pada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Melakukan permufakatan jahat dengan penyusunan atau gratifikasi atau menerima, menguasai atau menempatkan, menggunakan harta kekayaan berupa uang sebesar ±Rp40 miliar yang

diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari Tersangka IH, melalui Tersangka WP," jelasnya.

Selain penangkapan terhadap Sadikin, penyidik juga melakukan pengeledahan di kediaman Sadikin di Manyar Kertoarjo 8/85 RT 4/RW 11, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

"SR diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian, SR dibawa ke Jakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih intensif di Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung," tuturnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, tersangka Sadikin dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan terhitung sejak 15 Oktober-03 November 2023.

Tersangka Sadikin yaitu 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ● han

Yunita Terdakwa Pencabulan 17 Anak di Jambi Divonis 11 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Tanggisan Yunita Sari Anggraini (20), terdakwa kasus pencabulan 17 anak di Jambi, pecah saat mendengar putusan majelis hakim yang menghukumnya 11 tahun penjara.

Yunita adalah seorang wanita muda pemilik rental PS di Jambi. Yunita didakwa melakukan pencabulan terhadap 17 anak yang biasa menyewa PS di tempatnya.

Sidang pembacaan vonis terhadap Yunita pun dilakukan pada Kamis (12/10) di Pengadilan Negeri Jambi. Yunita hadir dan disaksikan pihak keluarga serta kuasa hukumnya.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 11 tahun kurungan serta dan denda sebesar Rp

1 miliar rupiah," kata Hakim Ketua, Alex Tahir Mangatur Hamonangan Pasaribu.

Dengan menggunakan kerudung hitam disertai rompi tahanan dan tangan terborgol, di ruangan sidang Yunita juga terlihat murung, langkah kaki Yunita juga terlihat berat seperti sedang merasakan kesedihan mendalam atas kondisi nya saat ini.

Kuasa hukum Yunita yakni Felda mengaku bahwa vonis yang dijatuhkan ke Yunita itu adalah suatu hal yang dianggap tinggi. Maka dari itu, pihak kuasa hukum nantinya akan mengajukan banding atas apa yang divonis terhadap kliennya itu.

"Kita sudah sampaikan upaya kita banding," kata Felda saat dihubungi, Jumat (13/10). ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BANDA ACEH

Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin memantau dan melihat kotak suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS) pemilihan keuchik (kepala desa) serentak tahun 2023 di Desa Kampung Baru, Banda Aceh, Aceh, Minggu (15/10). Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar pemilihan keuchik langsung (Pilchiksung) serentak yang diikuti 104 calon keuchik di 31 gampong (desa) dengan jumlah suara wajib pilih 60.461 orang.

KPK dan Polisi Diminta Tak Ragu Usut Kasus "Syahrul Yasin Limpo Memeras dan Diperas"

Masyarakat luas pasti mendukung Polisi dan KPK mengungkap tuntas kasus SYL memeras bawahannya dan kasus SYL diperas oleh pimpinan KPK.

JAKARTA (IM) - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mendorong penyidik lembaga antirasuah dan Polda Metro Jaya tidak ragu mengusut perkara terkait Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul merupakan mantan Menteri Pertanian yang diduga oleh KPK memeras bawahannya dan menerima gratifikasi. Namun, di sisi lain Syahrul juga diduga jadi korban pemerasan oleh pimpinan KPK. Perkara ini tengah diusut oleh Polda Metro Jaya.

"Baik itu di Polda *confidence* (yakin), di KPK *confidence*, Anda enggak perlu ragu," kata Saut dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Sabtu (14/10).

Penyidik di KPK dan Polda Metro Jaya harus sama-sama sudah mengantongi alat bukti yang cukup. Karena itu, mereka tidak boleh membuat publik curiga dengan menunjukkan keraguan dalam menangani perkara terkait Syahrul.

Saut mengatakan, masyarakat luas pasti akan mendukung penanganan perkara dugaan Syahrul memeras bawahannya dan diperas oleh pimpinan KPK.

"You firm, lu jalan (proses hukum Syahrul memeras dan diperas pimpinan KPK), pasti masyarakat akan dukung," ujar Saut.

Dua perkara terkait Syahrul di KPK dan Polda Metro Jaya tidak digunakan sebagai bargaining position atau posisi tawar satu sama lain. Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang saat ini bergulir di KPK, dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan KPK harus didorong untuk ditangani secara objektif.

"Nothing to do with bargaining, ini bukan untuk dirunding-rundingkan kasus ini, kasus ini terpisah," kata Saut.

"Ini tidak diperundingkan karena menekan di sini, di sini lemah, ini ditekan ini, enggak, enggak. Akan ambruk kalau begitu," lanjut Saut.

Pada kesempatan tersebut, Saut menyoroti tindakan KPK menangkap Syahrul di sebuah apartemen, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (12/10) petang. Padahal, politikus Partai Nasdem itu telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat (13/10).

Adapun surat penangkapan ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri dengan keterangan "selaku penyidik".

Menurut Saut, penangkapan Syahrul merupakan bentuk reaksi KPK atas proses hukum dugaan pemerasan yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya.

Salah satu materi gelar perkara dugaan pemerasan pimpinan KPK itu adalah foto pertemuan Firli dengan Syahrul di lapangan badminton.

"Itu bener mikirnya yang diduga bahwa kemudian ini adalah aksi reaksi itu pasti," kata Saut.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul ke tahap penyidikan. Polisi telah memeriksa 11 orang saksi. Hingga kini, Polda Metro Jaya belum mengungkap siapa sosok pimpinan

KPK yang diduga memeras Syahrul Yasin Limpo.

Firli mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Firli mengaku bertemu Syahrul Yasin Limpo pada 2 Maret 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang.

Menurut Firli, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023.

"Maka dalam waktu tersebut (2 Maret 2022), status saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya,

Senin (9/10).

Firli juga membantah tuduhan-tuduhan lain, salah satunya isu pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo. Menurut Firli, persoalan dugaan pemerasan yang saat ini mengarah ke pimpinan KPK merupakan bentuk serangan balik para koruptor.

"Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah *when the corruptor strike back*," kata Firli.

Pada Jumat (13/10), tim penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa ajudan Firli, Kevin Egananta selama sekitar 8 jam. ● han

Ganjar Center: Yenny Wahid Mendapat Skor Tertinggi untuk Bacawapres

JAKARTA (IM) - Sejumlah nama disebut potensial mendampingi bacapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, salah satunya nama Yenny Wahid.

Organ pemenangan capres Ganjar Pranowo, Ganjar Center merilis hasil temuan analisis big data cawapres yang ideal untuk Ganjar Pranowo. Ini merupakan analisis dengan menggunakan artificial intelligence untuk mengetahui kecenderungan terhadap isu-isu tertentu dengan melakukan eksplorasi big data.

Kornas Ganjar Center, Poempida Hidayatulloh mengatakan, dengan menggunakan big data sebagai analisis dalam membaca peta politik merupakan hal menarik dan bagian dari jawaban terhadap tantangan digitalisasi saat ini.

Data tersebut meliputi, Social Media data source, online News data source, surveys data, latest election results dan recent experts' opinions.

"Dalam analisis big data ini adanya beberapa parameter yang diukur. Parameter ini diambil berdasarkan variabel-variabel yang dianggap bernilai politis dalam kaitannya dengan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024," ujar Poempida Hidayatulloh saat menghadiri diskusi "Big Data Analytic Cawapres Ideal Ganjar", di Gedung CM, Matraman I, Jakarta Timur, dikutip Minggu (15/10).

Parameter yang digunakan tersebut meliputi dukungan dari partai koalisi, dukungan dari Megawati, dukungan dari NU, dukungan gender perempuan, dukungan internasional, tidak ada beban politik, representasi sebaran secara kultural, representasi sebaran secara geolokasi, representasi sebaran secara profesi, representasi sebaran secara ideologi.

Temuan dari analytic big data yang dilakukan Ganjar Center, menurut Poempida, menunjukkan bahwa mama Yenny Wahid memperoleh skor tertinggi yaitu 8.9 sebagai sosok cawapres ideal untuk Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Dikatakannya, keunggulan Yenny Wahid yang dikomparasikan dengan nama-nama cawapres lain yang juga muncul di banyak pemberitaan di media, setidaknya ditopang oleh empat variabel penting.

"Empat variabel tersebut adalah dukungan berbasis gender/perempuan, kultural, dukungan nahlidliyin, kultural dan international," kata Poempida.

Sementara, nama lain yang muncul adalah Mahfud MD dengan perolehan skor 8 dan Siandiaga Uno dengan skor sama 8.1. Mahfud MD, berdasarkan analytic big data terlihat kuat pada variable ideologi dan beban politik. Sementara, Siandiaga Uno terlihat kuat pada variable international, profesi, dan ideologi.

Indon Novo, analis Cakra Data menanggapi temuan analisa Big Data Ganjar Center Pranowo. Dia menyatakan bahwa data sangat penting di Pemilu 2024. Ini karena jumlah pemilih Indonesia yang sangat besar dan didominasi oleh generasi milenial dan Z.

Terkait dengan temuan Ganjar Center terhadap sosok Yenny Wahid sebagai cawapres ideal Ganjar Pranowo sengan skor 8.9, Indon Novo mengatakan bahwa apabila data ini sesuai dengan metodologi dan parameter, maka hasilnya representatif.

"Analisis Big Data juga sangat bergantung pada *use case* dan parameter yang digunakan. Karena, berbeda parameter yang digunakan maka hasilnya juga bisa berbeda,"katanya. ● han



BAKTI SOSIAL RANGKAIAN HUT KE-78 TNI

Danrem 061 Suryakencana Bogor Brigjen TNI Anan Nurakhman (kiri) beserta istri Retno Anan Nurakhman (kanan) berbincang dengan warga saat periksa kesehatan pada acara Bakti Sosial Korem 061 Suryakencana di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/10). Kegiatan bakti sosial yang digelar dalam rangkaian HUT ke-78 TNI tersebut dengan memberikan bantuan sembako dan pengobatan gratis kepada masyarakat.

Prabowo Subianto Didukung Relawan Projo Jadi Capres 2024

JAKARTA (IM) - Relawan Pro Jokowi (Projo) resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai kandidat Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang akan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang.

Menanggapi hal itu, Prabowo mengapresiasi langkah Projo mendukung dirinya tersebut. menurut

dia, dukungan Projo merupakan kehormatan bagi dirinya.

"Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar. Kepercayaan yang saudara saudara berikan kepada saya, saya terima sebagai amanah," ujar Prabowo di Kertajati 4, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10).

Prabowo menambahkan bahwa kepercayaan tersebut

seperti tugas bagi dirinya. Sehingga, dukungan tersebut dijadikan sebagai salah satu penugasan membangun Indonesia.

"Saya terima sebagai penugasan, sebagai penugasan mulia utk berbakti kepada negara dan bangsa adalah suatu penugasan yang mulia adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti kepada bangsa dan negara," paparnya.

Diketahui, Relawan Pro Jokowi (Projo) resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto di kontestasi Pemilu 2024.

Dukungan tersebut, dideklarasikan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di kediaman Prabowo yakni Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada

Sabtu (14/10).

"Kami dari Projo menyimpulkan (dukungan Jokowi) calon yang dimaksud adalah bapak Prabowo Subianto," ujar Budi di Kartanegara.

"Kami dari Projo sepakat untuk mendukung bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Pilpres 2024 mendatang," katanya. ● mei